

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian mengenai Faktor faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 – 2022, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji simultan Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, dan Dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022.
2. Secara parsial Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di kab/kota Provinsi Sumatera Utara. Yang artinya kenaikan PAD akan menaikkan anggaran Belanja Modal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022.
3. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Yang artinya kenaikan DAU akan menaikkan anggaran Belanja Modal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022.
4. Secara parsial Dana Bagi Hasil memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Yang artinya kenaikan DBH akan menaikkan anggaran Belanja Modal di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022.

5. Variabel independent yaitu PAD, DAU, DBH yang menjadi faktor dalam mempengaruhi Belanja Modal mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 77,14 % dan sisanya 22,86 % dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## 5.2 Saran

1. Realisasi penerimaan PAD yang rata – rata daerah masih rendah, harus terus melakukan upaya agar PAD bisa meningkat dan membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Yaitu dengan mengupayakan optimalisasi pengutipan pajak dan retribusi agar realisasi bisa optimal dan Pemerintah juga harus memanfaatkan realisasi pada belanja yang berdampak pada peningkatan PAD yaitu belanja modal. Lalu kedua dengan mengoptimalkan potensi penerimaan PAD dengan menambah layanan jasa PAD.
2. Dana alokasi umum digunakan untuk pemerataan keuangan pemerintah daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bijak dalam memakai penerimaan DAU untuk kepentingan pembangunan dan menyusun kebutuhan daerah dengan tepat sasaran.
3. Pengalokasian Dana bagi hasil didapati dari pengolaan pusat dari beberapa sumber penerimaan DBH di setiap daerah. Penyalurannya harus transparan, pembagian alokasi yang adil serta pemanfaatannya juga harus bisa berdampak pada pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus terus melakukan pemantauan akan pengelolaan DBH agar pemanfaatannya maksimal.